

Analisis Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus

Salma Febriana Danuputri, Sri Nawatmi

Universitas Stikubank Semarang

salmafebriana127@gmail.com nawatmi@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the excess realization of operational and office maintenance at the Special Class IA Semarang District Court, with a focus on the causal factors, and how to overcome budget excesses. The research method used is descriptive qualitative with empirical studies at the Special Class IA Semarang District Court. The data collected was RKA-KL (Work Plan and Budget) and LRA (Budget Realization Report) then conducted in-depth interviews after which analysis was carried out to draw conclusions. The results of the research show that several factors that cause excess operational and office maintenance budgets are unrealistic or non-comprehensive budget planning, changes in economic conditions, inefficiencies in project or operational management, lack of control and supervision of expenditure and non-compliance in the implementation of budget policies or lack of coordination. . How to overcome operational budget excesses at the Special Class IA Semarang District Court by strengthening the budget planning process, implementing a strict budget monitoring and control system and increasing the capacity and competence of human resources involved in budget management.

Keywords: Budget Planning, Operational Budget, Budget Realization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan realisasi operasional dan pemeliharaan kantor pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, dengan fokus pada faktor penyebab, dan cara mengatasi kelebihan anggaran. Metode riset yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan studi empiris pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Data yang dihimpun adalah RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran) dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) kemudian melakukan wawancara mendalam setelah itu dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan kelebihan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor adalah perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak komprehensif, adanya perubahan kondisi ekonomi, ketidakefisienan dalam manajemen proyek atau operasional, kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran atau kurangnya koordinasi. Cara mengatasi kelebihan anggaran operasional pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dengan memperkuat proses perencanaan anggaran, menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian anggaran yang ketat serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Anggaran Operasional, Realisasi Anggaran

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran merupakan pencairan dana atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada suatu periode tertentu. Jika dilihat data tentang penyerapan anggaran setiap tahun, rata-rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun, bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih rendah. Hal ini disebabkan instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya, terutama untuk belanja modal, terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu (Debby, 2019). Penyerapan anggaran dalam sektor publik merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya negara.

Menurut Halim (2017:48), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran digunakan untuk berbagai keperluan dan belanja yang mendukung operasional. Belanja pegawai merupakan bagian penting dari anggaran sebagai salah satu penunjang kelancaran kegiatan suatu instansi pemerintah (Habibi, 2021). Belanja pegawai adalah pengeluaran negara yang diberikan sebagai kompensasi berbentuk barang atau uang guna mencukupi beragam keperluan tenaga kerja di lembaga pemerintah. Anggaran belanja pegawai harus dikelola berdasarkan peraturan yang ada. Dengan menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan lain-lain.

Anggaran biaya operasional adalah taksiran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dibuat dan disusun secara berulang-ulang oleh perusahaan. Dalam anggaran tersebut dibuat ikhtisar hasil yang akan diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Gunawan (2018:53), manfaat analisis biaya anggaran operasional bagi perusahaan adalah mendorong setiap individu di dalam Perusahaan untuk berpikir ke depan, mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian, karena setiap bagian menyadari bahwa tidak dapat berdiri sendiri, dan mendorong adanya pelaksana atas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya.

Menurut Rudianto (2021) biaya operasional adalah komponen biaya perusahaan di luar biaya produksi yaitu biaya untuk memasarkan produk perusahaan hingga sampai ke tangan konsumen beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses administratif yang dilakukan perusahaan. Menurut Murhadi (2017:37), biaya operasional meliputi biaya operasi (*operating expense*) merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi (*selling and administrative expense*), biaya iklan (*advertising expense*),

biaya penyusutan (*depreciation and amortization expense*), serta perbaikan dan pemeliharaan (*repairs and maintenance expense*).

Perencanaan menurut (Rahajeng, 2016) merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu sumber daya yang harus diperhitungkan adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Bastian, 2010). Menurut Novyawati (2020) Perencanaan anggaran ialah tahapan pembuatan rencana keuangan, khususnya keuangan dan penghasilan, serta mengalokasikan setiap aktivitas berdasarkan tujuan dan fungsi yang ingin diwujudkan. Perencanaan anggaran juga merupakan tahapan awal untuk berjalannya kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrumen atau alat dalam mengevaluasi dan memonitor kinerja pemerintah untuk mencapai visi misi yang dituju. Anggaran daerah yang tergambar di dalam APBD adalah alat kebijakan penting pemerintahan daerah, menempati posisi utama untuk mengembangkan efektivitas serta kompetensi pemerintah daerah dan bisa membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi dalam kemampuan serta kinerja pemerintah dirasa masih terlalu lemah dalam hal perencanaan dan penganggaran keuangan.

Menurut Hasan (2008:13) “Realisasi adalah tindakan yang nyata atas adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”. Menurut Dahlan (2010:978) “Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata”. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian rencana tersebut di realisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

Alat guna melaksanakan perancangan anggaran ialah RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran). RKA-KL ialah dokumen yang menggambarkan perencanaan aktivitas dan alokasi anggaran yang dibutuhkan guna periode tertentu dalam setahun anggaran. RKA-KL harus akurat, karena akan memberikan dampak pada proses-proses anggaran selanjutnya, seperti pelaksanaan, penyerapan, dan pengendalian anggaran. Setelah RKA-KL langkah berikutnya ialah menerapkan dan membuat LRA (Laporan Realisasi Anggaran). LRA ialah pelaporan detail tentang bagaimana anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKA-KL.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) dilakukan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Anggaran diharapkan tidak mengalami kelebihan tetapi kenyataannya masih terjadi di beberapa satker (satuan kerja), salah satunya Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2022 anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sudah efektif dan efisien dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,75%. Sedangkan pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengalami kekurangan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 119.805.338. Hal tersebut disebabkan karena adanya kelebihan penyerapan anggaran mencapai 104%. Penyerapan anggaran yang berlebih ditandai dengan adanya realisasi melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Untuk realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.018.026.338 sedangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.898.221.000.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan realisasi pada anggaran operasional dan pemeliharaan kantor dan cara mengatasi kelebihan realisasi tersebut.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2022-2023

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (=/-)	PENYERAPAN (%)
1	2022	3.523.814.000	3.514.988.918	8.825.082	99,75%
2	2023	2.898.221.000	3.018.026.338	-119.805.338	104%

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Penelitian memakai 2 jenis data yakni data primer dan sekunder. Data primer, di ambil dengan *interview* mendalam kepada Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (PTIP), serta bagian Tata Usaha dan Keuangan. Sementara data sekunder, data pelengkap berupa RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran) dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun 2023.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata dalam Witara, dkk. (2023:86), metode studi deskriptif kualitatif dipakai guna melukiskan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada, baik rekayasa manusia atau alamiah. Metode berikut mencermati mutu, karakteristik, serta hubungan antar aktivitas. Riset berikut lebih berfokus pada studi empiris, yaitu penelitian mendalam dan menyeluruh selama waktu tertentu (Abdussamad. 2021).

Penelitian diawali dengan pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen berupa RKA-KL dan LRA tahun 2022-2023. Kemudian dilakukan wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan (PTIP), kasubbag Tata Usaha dan Keuangan serta staf Tata Usaha dan keuangan Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam kemudian menganalisis data yang telah

dikumpulkan sebelumnya. Setelah dilakukan wawancara tahap berikutnya membuat transkrip hasil wawancara. Tahap akhir melakukan pengolahan data yang telah di kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2022

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (=/-)	%
1	Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	731.996.000	731.733.004	262.996	99,96%
2	Layanan Daya dan Jasa	859.823.000	856.518.120	3.304.880	99,62%
3	Pemeliharaan Kantor	1.198.803.000	1.195.392.894	3.410.106	99,72%
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	139.977.000	139.420.000	557.000	99,60%
5	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	505.440.000	505.440.000	0	100,00%
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	8.300.000	8.280.000	20.000	99,76%
7	Rapat Koordinasi Internal	11.400.000	11.385.200	14.800	99,87%
8	Koordinasi ke Pusat	21.800.000	20.745.500	1.054.500	95,16%
9	Jamuan Tamu	4.725.000	4.617.200	107.800	97,72%
10	Penanganan Covid-19	34.350.000	34.257.000	93.000	99,73%
11	Poliklinik	7.200.000	7.200.000	0	100,00%
	JUMLAH	3.523.814.000	3.514.988.918	8.825.082	99,75%

Berdasarkan tabel 2 di atas pada tahun 2022 tidak terjadi kelebihan anggaran (99,75%) karena sudah efektif dan efisien.

Tabel 3 Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2023

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (=/-)	%
1	Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	781.134.000	814.897.726	-33.763.726	104%
2	Layanan Daya dan Jasa	324.800.000	321.774.500	3.025.500	99%
3	Pemeliharaan Kantor	1.048.901.000	1.006.464.212	42.436.788	96%

4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	175.706.000	175.227.000	479.000	100%
5	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	524.880.000	657.720.000	-132.840.000	125%
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	7.500.000	7.500.000	0	100%
7	Rapat Koordinasi Internal	13.500.000	13.296.900	203.100	98%
8	Koordinasi ke Pusat	21.800.000	21.146.000	654.000	97%
9	Jamuan Tamu	0	0	0	0
10	Penanganan Covid-19	0	0	0	0
11	Poliklinik	0	0	0	0
	JUMLAH	2.898.221.000	3.018.026.338	-119.805.338	104%

Berdasarkan tabel 3 pada tahun 2023 mengalami kekurangan anggaran terjadi pada Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran serta Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pada Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran realisasi sebesar Rp. 814.897.726 untuk perencanaannya sebesar Rp.781.134.000 dan terjadi selisih sebesar Rp. 33.763.726. Kebutuhan sehari-hari seperti Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi. Lalu pada Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim realisasi sebesar Rp. 657.720.000 untuk perencanaan sebesar Rp. 524.880.000 dan terjadi selisih sebesar Rp. 132.840.000. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim seperti Belanja sewa (Rumah Dinas Hakim).

Kelebihan anggaran operasional pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dapat memberikan fleksibilitas untuk menangani kebutuhan tak terduga, seperti pemeliharaan fasilitas mendadak atau kebutuhan tambahan dalam proses peradilan. Ini juga memungkinkan peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelatihan staf atau pembaruan teknologi. Namun, anggaran operasional yang berlebih juga bisa menunjukkan perencanaan yang kurang akurat dan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya. Penggunaan anggaran yang melebihi batas yang direncanakan dapat mengindikasikan kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pengeluaran, serta potensi pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi institusi. Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Negeri Semarang untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi pengelolaan anggaran agar dapat memaksimalkan manfaat dari dana yang tersedia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kelebihan Anggaran Operasional

1. Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak komprehensif bisa menyebabkan estimasi awal yang terlalu rendah, sehingga kebutuhan sebenarnya melebihi anggaran yang disediakan.
2. Adanya perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi atau kenaikan harga bahan bakar dan barang-barang penting lainnya dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional.
3. Ketidakefisienan dalam manajemen proyek atau operasional, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan material, dapat menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu.
4. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran juga menjadi faktor signifikan. Sistem pengawasan yang lemah atau kurangnya pemantauan berkala dapat menyebabkan pengeluaran tidak terdeteksi sampai melebihi batas yang ditetapkan. Kejadian tak terduga seperti bencana alam, kerusakan fasilitas, atau peningkatan jumlah kasus yang harus ditangani secara tiba-tiba juga dapat memerlukan alokasi dana tambahan yang tidak diperhitungkan dalam anggaran awal.
5. Ketidaksihonestan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran atau kurangnya koordinasi antara departemen yang berbeda dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kelebihan anggaran.

Cara Mengatasi Kelebihan Anggaran Operasional

Untuk mengatasi kelebihan anggaran operasional pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat proses perencanaan anggaran. Dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan realistis, mencakup semua kemungkinan biaya dan variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran. Penyusunan anggaran harus didasarkan pada data historis yang akurat dan proyeksi keuangan yang memperhitungkan faktor-faktor risiko. Selain itu, penting untuk menyertakan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, sehingga pengeluaran tambahan dapat diminimalisir.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian anggaran yang ketat. *Monitoring* berkala terhadap realisasi anggaran memungkinkan identifikasi dini terhadap penyimpangan yang terjadi. Penerapan mekanisme peringatan dini dan pelaporan berkala kepada manajemen akan memastikan bahwa setiap penyimpangan segera terdeteksi dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Selain itu, audit internal yang rutin dan audit eksternal oleh auditor independen akan memberikan perspektif objektif mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pelatihan dan pengembangan staf yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan anggaran akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun anggaran yang lebih akurat dan efisien. Penggunaan teknologi manajemen anggaran yang tepat juga dapat membantu dalam memantau dan mengendalikan pengeluaran secara lebih efektif. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar departemen dan komunikasi yang lebih baik dalam proses pengelolaan anggaran akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dapat mengatasi tantangan kelebihan anggaran operasional dan mengelola dana secara lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber hasil riset dan pembahasan yang sudah dijalankan pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengenai anggaran operasional, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA mengalami kelebihan anggaran operasional pada tahun anggaran 2023. Kelebihan anggaran disebabkan oleh realisasi yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor kelebihan anggaran ada 5 yaitu Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak komprehensif, Adanya perubahan kondisi ekonomi, ketidakefisienan dalam manajemen proyek atau operasional, Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran, Ketidaksiesuaian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran. Cara mengatasi kelebihan anggaran operasional pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dengan memperkuat proses perencanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ali Hasan, (2008). *Marketing*. Yogyakarta: Media Utama.
- Bastian, I (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Debby, V (2019). Analisis Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan pertamanan Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No.2.
- Gunawan, S (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang, *Jurnal Parsimonia*. Vol. 4 No. 3.
- Habibi (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vo. 11 No. 2.

- Halim, A (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, J. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marliana, W. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol.17 No.2
- Murhadi, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novyawati, F. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Skripsi, Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung*.
- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rina, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satker Kementerian Perindustrian di Kota Padang, *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang*.
- Rudianto, (2018). *Akuntansi Manajemen*. Cetakan Tujuh. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Witara, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Pendidikan: Panduan dan Praktisi*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.